



PEMERINTAH PROVINSI NTB

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2021 (TRIWULAN I)



KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan APBN Tahun 2021 Triwulan I dapat diselesaikan. Laporan ini diujarkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN di wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan oleh 50 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 45 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (8 Satker Tugas Pembantuan dan 37 Satker Dekonsentrasi) dan 5 Satker di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB. Total alokasi anggaran sebesar Rp.363.325.711.000 yang terdiri atas alokasi anggaran pada Satker Provinsi sebesar Rp.345.404.465.000 (Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.102.008.026.000 dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.243.396.439.000) dan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) sebesar 17.921.246.000. Adapun realisasinya pada triwulan 1 tahun 2021, telah terealisasi sebesar Rp.18.808.515.842 atau hanya 5,18% dengan realisasi fisik mencapai 7,15%, dengan rincian realisasi yang diselenggarakan oleh 45 Satker Provinsi sebesar Rp.18.658.144.342 atau 5,40% dengan realisasi fisik sebesar 5,60% (Dana Dekonsentrasi terealisasi sebesar Rp.4.107.586.690 atau 4,03% dan Dana Tugas Pembantuan terealisasi sebesar Rp.14.550.557.652 atau 5,98%). Pada Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB terealisasi sebesar Rp.150.371.500 atau 0,84% dengan realisasi fisik 1,56%.

Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan 1 Tahun 2021 secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya; dan (2) Masih terdapat beberapa Satker yang masih realisasi nol karena belum adanya petunjuk

teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekon/TP.

Dalam penyusunan Laporan APBN Tahun 2021 Triwulan I ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja pada triwulan berikutnya. Akhirnya, semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-nya bagi kita semua

Wabillahi taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Mei 2021
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iv
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. INFORMASI RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021	4
1. Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2021	4
2. Arah Pengembangan Wilayah	8
3. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	10
4. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	11
a) Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	11
b) Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	14
c) Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	17
d) Prioritas Nasional 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	23
e) Prioritas Nasional 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	25
f) Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	29
g) Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	31
A. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH PROVINSI NTB	36
B. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	40
A. KESIMPULAN	41
B. SARAN	42

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.	Prioritas Nasional Tahun 2021	11
Gambar 2.	Program Prioritas pada Prioritas Nasional 1.....	13
Gambar 3.	Kerangka PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	16
Gambar 4.	Kerangka PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	20
Gambar 5.	Kerangka PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	24
Gambar 6.	Kerangka PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	27
Gambar 7.	Kerangka PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	30
Gambar 8.	Kerangka PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	33
Tabel 1.	Target Indikator Pembangunan Tahun 2021	5
Tabel 2.	Perkembangan dan Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021	5
Tabel 3.	Capaian, Perkiraan dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	9
Tabel 4.	Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Kemiskinan Wilayah (Persentase Penduduk Miskin)	9
Tabel 5.	Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Pengangguran Wilayah (Persentase Angkatan Kerja yang Menganggur)	9
Tabel 6.	Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2021.....	11
Tabel 7.	Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	12
Tabel 8.	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	13
Tabel 9.	Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan .	15
Tabel 10.	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	16
Tabel 11.	Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	18
Tabel 12.	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	20
Tabel 13.	Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.....	24
Tabel 14.	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.....	25

Tabel 15.	Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	26
Tabel 16.	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ...	27
Tabel 17.	Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	30
Tabel 18.	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	31
Tabel 19.	Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	32
Tabel 20.	Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	33
Tabel 21.	Capaian Realisasi APBN Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB	35
Tabel 22.	Capaian Realisasi APBN Tahun 2021 Triwulan I pada Pemerintah Provinsi NTB	36
Tabel 23.	Capaian Realisasi APBN Tahun 2021 Triwulan I pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan (Pasal 19) sebagai berikut:

- a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah ini, pemerintah daerah memiliki hak **Otonomi daerah Indonesia**. Otonomi daerah adalah segala hak, kuasa, kewenangan dan kewajiban dari daerah otonom dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan sendiri perihal pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah ini, diharapkan pelayanan masyarakat dapat meningkat, begitupun dengan pengembangan demokrasi. Ketika daerah otonom menjalankan otonomi daerahnya, daerah tersebut dapat meningkatkan daya saing beserta pemberdayaan masyarakatnya. Selain itu, otonomi daerah juga dapat menjadikan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih intens. Selanjutnya prinsip penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangannya di daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua

wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga.

Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Jadi Dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Ada beberapa kelebihan dari asas dekonsentrasi diantaranya secara politis eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan rakyat, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat

mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau nasional di bidang politik, ekonomi dan administrasi serta dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sedangkan pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya. Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di daerah. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

C. INFORMASI RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Di sisi lain, hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2019 menunjukkan bahwa Prioritas Nasional 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dan Prioritas Nasional 3 : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya.

1. Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2021

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19. Tema pembangunan RKP 2021 adalah "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**".

Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan. Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Target Indikator Pembangunan Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,7-9,1
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2-9,7
Rasio Gini (nilai)	0,377-0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,78-72,95
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	23,55-24,05

Sumber: RKP Tahun 2021

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha di bidang lain yang terkait.

Kondisi makro ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Perkembangan dan sasaran ekonomi makro untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan dan Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021

	2019	2020*	2021**	
			RPJMN	SASARAN
Perkiraan Besaran-besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (%)	5,0	-0,4 - 1,0	5,4 - 5,7	4,5 - 5,5
Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	2,6	3,0 ± 1,0	3,0	3,0 ± 1,0
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% YoY)	-5,1	(10,7) - (7,7)	6,3	(6,0) - (7,9)
Cadangan Devisa (USD miliar)	129,2	129,4 - 130,9	133,2	132,4 - 133,6
- dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah)	7,3	9,6 - 9,2	7,0	9,3 - 8,7
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-2,7	(1,3) - (1,6)	-2,3	(1,7) - (2,0)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,8	8,6	10,1 - 10,7	8,3 - 8,4
Keseimbangan Primer (% PDB)	-0,4	-4,3	0,1 - 0,0	(3,1) - (3,4)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-2,2	-6,3	(1,6) - (1,7)	(5,2) - (5,5)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	30,2	37,6	29,4 - 30,0	39,8 - 40,0
Peringkat Indonesia pada EODB				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40

	2019	2020*	2021**	
			RPJMN	SASARAN
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,4	(2,8) – (3,0)	5,8 – 6,2	6,0 – 7,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	809,6	817,2	991,3	858,5
Target Pembangunan				
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2	9,7 – 10,2	8,0 – 8,5	9,2 – 9,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	8,1 – 9,2	4,8 – 5,0	7,7 – 9,1
Rasio Gini (nilai)	0,380	0,379 – 0,381	0,375 – 0,379	0,377 – 0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,92	72,11 – 72,21	73,26	72,78 – 72,95

Sumber: RKP Tahun 2021

Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran $3,0 \pm 1,0$ persen dan nilai tukar rupiah diperkirakan menguat pada kisaran Rp.13.700 – Rp.14.900 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2021 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2 – 9,7 persen dari 7,7 – 9,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377 – 0,379 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,78 – 72,95 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup

1. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

2. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi COVID-19. Selain itu, integrasi

program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.

4. Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya, dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas;

peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

2. Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada tahun 2021 bertujuan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan wilayah akan dilakukan dengan strategi pertumbuhan atau transformasi sosial ekonomi wilayah dan strategi pemerataan yang diperkuat dengan mitigasi bencana dan pengurangan risiko. Strategi pengembangan wilayah tersebut secara spasial ditunjukkan oleh koridor pertumbuhan, koridor pemerataan, dan sebaran lokus risiko bencana.

Pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana tata ruang dan didukung oleh layanan pertanahan modern berbasis digital, dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis pulau/kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi keunggulan dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah pembangunan tersebut adalah Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sumatera.

Dampak pandemi COVID-19 dirasakan daerah dalam penurunan volume produksi dan perdagangan sebagai akibat pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi, sedangkan kapasitas produksi dan ketersediaan angkatan kerja relatif tidak berubah. Target pertumbuhan ekonomi wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka menurut wilayah dijabarkan. Sasaran pengembangan wilayah tahun 2021 adalah pulihnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatnya laju pertumbuhan dan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap terjaganya prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali, serta membaiknya pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan memperhitungkan penanganan bencana pandemi COVID-19 secara tuntas pada tahun 2020, maka tahun 2021

memberikan peluang bagi perekonomian wilayah untuk tumbuh lebih cepat (rebound) dan kembali ke jalur pertumbuhan naturalnya.

Tabel 3. Capaian, Perkiraan dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
(Persentase Perubahan terhadap Tahun Sebelumnya)

Wilayah	Capaian			Perkiraan 2020	Sasaran 2021
	2017	2018	2019		
Papua	4,5	7,1	(10,7)	0,0–1,6	2,6–5,8
Maluku	6,7	6,8	5,8	(0,3)–1,5	5,2–6,2
Sulawesi	7,0	6,6	6,7	(0,5)–2,1	5,4–7,0
Kalimantan	4,3	3,9	5,0	(0,4)–1,8	3,6–5,7
Nusa Tenggara	2,1	(0,4)	4,5	0,0–1,3	3,5–5,2
Jawa-Bali	5,6	5,7	5,5	(0,5)–0,8	4,8–5,5
Sumatera	4,3	4,6	4,6	(0,3)–1,3	3,9–5,1

Sumber: RKP Tahun 2021

Tabel 4. Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Kemiskinan Wilayah
(Persentase Penduduk Miskin)

Wilayah	Capaian			Perkiraan 2020	Sasaran 2021
	2017	2018	2019		
Papua	26,7	26,4	25,4	25,9	25,5
Maluku	13,4	13,3	13,2	13,5	12,8
Sulawesi	10,9	10,4	10,1	10,2	9,8
Kalimantan	6,2	4,1	5,8	5,8	5,6
Nusa Tenggara	18,3	17,9	17,4	18,3	17,8
Jawa-Bali	9,2	8,7	8,2	8,3	7,9
Sumatera	10,5	10,2	9,8	10,1	9,6

Sumber: RKP Tahun 2021

Tabel 5. Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Pengangguran
Wilayah (Persentase Angkatan Kerja yang Menganggur)

Wilayah	Capaian			Perkiraan 2020	Sasaran 2021
	2017	2018	2019		
Papua	4,2	3,8	4,2	5,8–6,9	5,4–6,8
Maluku	7,6	6,2	6,2	8,1–9,2	7,8–9,1
Sulawesi	4,9	4,7	4,5	7,1–8,2	6,8–8,1
Kalimantan	5,0	4,8	4,7	7,1–8,2	6,7–8,1
Nusa Tenggara	3,3	3,3	3,4	6,0–7,1	5,7–7,0
Jawa-Bali	5,9	5,7	5,7	8,6–9,7	8,2–9,5
Sumatera	5,2	5,1	5,0	7,8–8,9	7,5–8,8

Sumber: RKP Tahun 2021

3. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat. Basis keunggulan Wilayah Nusa Tenggara berada pada sektor perikanan dan kelautan yaitu rumput laut, garam, peternakan sapi, perkebunan kopi, pertambangan tembaga, emas, serta pariwisata.

Pada tahun 2021, strategi akselerasi pertumbuhan wilayah dilakukan dengan delapan langkah:

- a. Memfasilitasi pengembangan industri MICE (*Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition*) dan perhelatan olahraga internasional sebagai penggerak sekaligus sarana promosi pariwisata Nusa Tenggara melalui pengembangan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo, sesuai rencana induk (*masterplan*) kawasan pariwisata yang telah disusun;
- b. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, peternakan, perkebunan, serta budidaya tanaman pangan termasuk pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan;
- c. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain tenun tradisional;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat koneksi transportasi dengan hub pariwisata internasional utama Bali;
- e. Mengembangkan kawasan perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
- f. Mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung sektor industri dan pariwisata dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
- g. Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Nusa Tenggara;
- h. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Target dari sasaran yang diuraikan di atas dapat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2021

Indikator	Target Tahun 2021	
	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
Pertumbuhan Ekonomi*	2,2–4,8	5,2–5,7
Tingkat Kemiskinan	14,5	20,9
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,1–7,4	5,3–6,7

Sumber: RKP Tahun 2021

4. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2021, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang dituangkan dalam 7 Prioritas Nasional sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1. Prioritas Nasional Tahun 2021



Sumber: RKP Tahun 2021

a) Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19 dengan mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan ekspor dan daya saing perekonomian.

Penguatan ekonomi akan dilaksanakan di antaranya melalui (1) penguatan sistem pangan berkelanjutan, yaitu dengan menjalankan Program Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) upaya peningkatan ketahanan energi dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi, serta meningkatkan keandalan infrastruktur energi; (3) penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor dan pengadaan produk dalam negeri, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja yang didukung penerapan teknologi, dan integrasi sektor hulu-hilir; (4) pemulihan pariwisata Indonesia dengan meningkatkan konektivitas dan event, memperluas pemasaran, serta meningkatkan daya dukung dan diversifikasi destinasi pariwisata; dan (5) penguatan ekosistem kelembagaan dan regulasi untuk mendukung kepastian usaha, perluasan investasi, efisiensi distribusi dan perdagangan, serta peningkatan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 7. Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Ketahanan Ekonomi untuk Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan					
NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				
	1.1 Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (%)	> 8,79	13,40	14,50	23,00
	1.2 Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	86,40	90,40	91,60	95,20
	1.3 Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP))	11	11	11	11
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian				
	2.1 Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,30	3,55	3,65	3,95
	2.2 Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	3,64	0,77 - 2,02	3,32 - 3,88	4,00 - 4,10
	2.3 Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a)) (%)	3,80	(1,87) - 0,79	4,68 - 5,46	8,10
	2.4 Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*) (%)	19,70	19,31 - 19,56	19,63 - 19,84	21,00
	2.5 Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)*) (US\$ Miliar)	19,70	3,30 - 4,90	4,80 - 8,50	21,50 - 22,90
	2.6 Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (%)	4,80	4,00	4,20	4,50
	2.7 Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,51	0,14 - 0,35	2,30 - 2,80	2,70 - 3,00
	2.8 Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,45	2,80 - 0,50	6,00 - 7,10	8,00 - 8,40
	2.9 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	2,60	7,42 - 9,33	7,00 - 9,80	10,10
	2.10 Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	0,87	7,70 - 5,10	3,50 - 5,10	6,20
	2.11 Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	9,76	8,57	8,30 - 8,40	10,70 - 12,30

Sumber: RKP Tahun 2021

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 2. Program Prioritas pada Prioritas Nasional 1



Sumber: RKP Tahun 2021

Sedangkan untuk target dari masing-masing program prioritas dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1.	PP 1. Penuhungan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)				
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)				
	1.1 Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (Giga Watt) - kumulatif	10,30	10,90	11,80	19,20
	1.2 Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik (Juta Kilo Liter)	6,90	10,00	10,20	17,40
2.	PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi				
	Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi				
	2.1 Produktivitas air (water productivity) (m ³ /kg)	N/A	3,40	3,30	3,00
3.	PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan				
	Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan				
	3.1 Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	103,21	103,00	102,00 – 104,00	105,00
	3.2 Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2.100	2.100	2.100	2.100
	3.3 Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57,00	57,00	57,00	57,00

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
	3.4 Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	6,70	6,20	5,80	5,00
	3.5 Food Insecurity Experience Scale (FIES) (%)	5,80	5,20	4,80	4,00
4.	PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan				
	Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan				
	4.1 Konservasi Kawasan Kelautan (I4.5.1*) (juta ha)	23,10	23,40	24,60	26,90
	4.2 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman (I4.4.1*) (%)	53,60	<64	<67	<80
	4.3 Produksi perikanan (juta ton)	23,86	21,17	27,55	32,70
	4.4 Produksi garam (juta ton)	2,85	2,40	3,10	3,40
	4.5 Nilai Tukar Nelayan (nilai)	N/A	102,00	102,00 – 104,00	107,00
5.	PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi				
	Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi				
	5.1 Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.3.1(c)*) (%)	24,82	25,20	26,50	30,80
	5.2 Pertumbuhan wirausaha (%)	1,70	2,00	2,50	4,00
	5.3 Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,54	5,10	5,20	5,50
6.	PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi				
	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi				
	6.1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	4,30	1,99 – 0,79	4,75 – 5,54	8,40
	6.2 Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	17,58	17,20 – 17,44	17,63 – 17,84	18,90
	6.3 Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	1.165,30	1.157,00	1.277,00	1.641,00
	6.4 Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	18,90	17,40	17,90	22,50
	6.5 Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%)	14,96	14,40	14,60	15,70
	6.6 Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	12,90	10,00	10,50	12,00
	6.7 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19	17,25	17,90	19,90
	6.8 Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat)	73	Menuju 40	Menuju 40	Menuju 40
	6.9 Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	809,63	817,20	858,50	1.500,00
	6.10 Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	215,94	227,20	268,70	782,00
7.	PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri				
	Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)				
	7.1 Neraca perdagangan (US\$ miliar)	3,51	5,30 – 8,47	10,76 – 12,75	15,00
	7.2 Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	4,82	10,70 – 7,67	5,96 – 7,86	9,80
	7.3 Jumlah wisatawan mancanegara (juta kunjungan)	16,10	2,80 – 4,00	4,00 – 7,00	16,00 – 17,00
	7.4 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	290,00	120,00 – 140,00	180,00 – 220,00	320,00 – 335,00
8.	PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi				
	Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi				
	8.1 Kontribusi sektor jasa keuangan / PDB (%)	4,24	4,22	4,17	4,40
	8.2 Biaya logistik terhadap PDB (%)	23,20	23,20	22,20	20,00
	8.3 Rasio M2/PDB (%)	38,76	39,46	39,74	43,20
	8.4 Peringkat travel and tourism competitiveness index (peringkat)	40	40	36 – 39	31 – 34
	8.5 Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	0	1,97	11,99	Selesai
	8.6 Imbal hasil (yield) surat berharga negara (%)	7,30	Meningkat	Menurun	Menurun
	8.7 Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	10,38	22,94	25,94	34,94

Sumber: RKP Tahun 2021

b) Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan Wilayah pada tahun 2021 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi,

mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

Sasaran pengembangan wilayah pada periode 2020 – 2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional diatas, tentunya pembangunan wilayah didukung oleh kontribusi dari percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang diprioritaskan serta dengan pemerataan wilayah lainnya dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah tahun 2020 – 2024, serta dengan memperhatikan arahan Presiden RI, maka pembangunan wilayah pada tahun 2021 akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pembangunan wilayah sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Tabel 9. Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia				
	1.1 Laju pertumbuhan PDRB KTI (%/tahun)	3,9	0,4 – 0,8	4,2 – 6,1	7,9
	1.2 IPM KTI (nilai minmaks)	60,8 – 76,6	60,6 – 77,2	61,1 – 77,7	63,1 – 79,3
	1.3 Persentase penduduk miskin KTI (%)	14,4	11,9	11,5	10,7
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia				
	2.1 Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)	3,9	0,4 – 1,3	4,5 – 5,4	6,3
	2.2 IPM KBI (nilai minmaks)	69,6 – 80,8	69,6 – 82,0	70,1 – 82,5	71,9 – 84,2
	2.3 Persentase penduduk miskin KBI (%)	10,9	8,8	8,4	6,7

Sumber: RKP Tahun 2021

Pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh Program Prioritas. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 3. Kerangka PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Sumber: RKP Tahun 2021

Sedangkan untuk target dari masing-masing program prioritas dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera				
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera				
	1.1 Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera (%/tahun)	4,6	0,3 – 1,3	3,9 – 5,1	5,6
	1.2 IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (nilai min-maks)	69,6 – 75,5	69,6 – 76,1	70,1 – 76,5	71,9 – 78,2
	1.3 Persentase penduduk miskin wilayah Sumatera (%)	9,8	10,1	9,6	5,8
2	PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali				
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali				
	2.1 Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun)	5,5	0,5 – 0,8	4,8 – 5,5	6,3
	2.2 IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai min-maks)	71,5 – 80,8	72,1 – 82,0	72,7 – 82,5	74,6 – 84,2
	2.3 Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%)	8,2	8,3	7,9	5,9
3	PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara				
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara				
	3.1 Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (%/tahun)	4,5	0,0 – 1,3	3,5 – 5,2	5,1
	3.2 IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara (nilai min-maks)	65,2 – 68,1	65,6 – 68,9	66,3 – 69,5	68,4 – 71,9
	3.3 Persentase penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara (%)	17,4	18,3	17,8	13,7
4	PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan				
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan				
	4.1 Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (%/tahun)	5,0	0,4 – 1,8	3,6 – 5,7	5,4
	4.2 IPM Provinsi Wilayah Kalimantan (nilai min-maks)	67,7 – 76,6	68,0 – 77,1	69,0 – 77,7	71,2 – 79,3
	4.3 Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (%)	5,8	5,8	5,6	3,3

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
5	PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi				
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi				
	5.1 Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi (%/tahun)	6,7	0,5 - 2,1	5,4 - 7,0	6,9
	5.2 IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi (nilai min-maks)	65,7 - 73,0	66,4 - 73,4	67,0 - 73,9	69,4 - 75,8
	5.3 Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi (%)	10,1	10,2	9,8	7,9
6	PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku				
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku				
	6.1 Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun)	5,8	0,3 - 1,5	5,2 - 6,2	6,0
	6.2 IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min-maks)	68,7 - 69,5	69,3 - 70,0	69,9 - 70,5	72,3 - 72,3
	6.3 Persentase penduduk miskin wilayah Maluku (%)	13,2	13,5	12,8	9,4
7	PP 7. Pengembangan Wilayah Papua				
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua				
	7.1 Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun)	-10,7	0,0 - 1,6	2,6 - 5,8	6,0
	7.2 IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min-maks)	60,8 - 64,7	60,6 - 64,8	61,1 - 65,4	63,9 - 67,2
	7.3 Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%)	25,4	25,9	25,5	19,0

Sumber: RKP Tahun 2021

c) Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan manusia perlu difokuskan pada upaya untuk mempercepat pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19.

Kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021 diarahkan untuk (1) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (2) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui reformasi sistem perlindungan sosial, antara lain integrasi program bantuan sosial untuk meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan sebagai upaya meredam penambahan penduduk miskin akibat dampak COVID-19; (3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan sistem kesehatan dan health security, termasuk jaminan terhadap akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; (4) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) menyediakan infrastruktur jaringan internet dan mengembangkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual terutama di masa krisis (sekolah di rumah); (6) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui penguatan sistem data dan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, penguatan koordinasi pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha; (7) memperluas akses penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif, seperti modal dan legalitas kepemilikan tanah; dan (8) meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia, pengembangan riset dan inovasi terkait sektor-sektor strategis dalam menghadapi dampak COVID-19 khususnya sektor kesehatan dan sektor-sektor pendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, pembudayaan dan pemanfaatan momentum keikutsertaan/penyelenggaraan event olahraga untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat dunia, diantaranya melalui penyelenggaraan *The Federation Internationale de Football Association (FIFA) U-20 World Cup* di Indonesia, serta penguatan pendamping pembangunan. Kebijakan pembangunan manusia dilaksanakan berdasarkan siklus hidup dan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19, sasaran yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan				
	1.1 An gka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2.28	2.26	2.24	2.10
	1.2 Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	95,17	98,00	99,00	100,00
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk				
	2.1 Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):				
	- Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	83,47	82,00	85,00	98,00
	- Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	58,60	65,25	72,00	80,00
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan				
	3.1 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	305	230	217	183
	3.2 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,67	24,10	21,10	14
	3.3 Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	319	272	252	190
	3.4 Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,80	21,80	21,80	21,80

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
	3.5 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,10	9,10	9,00	8,70
	3.6 Nilai rata-rata hasil PISA:				
	- Membaca (nilai)	371	371	394	396
	- Matematika (nilai)	379	379	385	388
	- Sains (nilai)	396	396	399	402
	3.7 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,75	8,74	8,85	9,18
	3.8 Harapan lama sekolah (tahun)	12,95	13,24	13,40	13,89
4	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda				
	4.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	62,72	66,34	68,10	73,49
	4.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	91,07	91,21	91,28	91,39
	4.3 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	51,50	53,56	54,59	57,67
5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan				
	5.1 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) (%)	30,40	32,00	35,00	40,00
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing				
	6.1 Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72	43,72	45,43	49,80
	6.2 Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)				
	- Top 200	0	0	0	1
	- Top 300	1	1	1	2
	- Top 500	2	2	2	3
	6.3 Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,60	41,00	41,55	43,10
	6.4 Peringkat Global Innovation Index	85	80 - 85	80 - 85	75 - 80

Sumber: RKP Tahun 2021

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing untuk mendukung pemulihan dampak COVID-19 akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu: (1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan; (2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; (3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6) Pengentasan Kemiskinan; dan (7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, seperti pada gambar berikut.

Gambar 4. Kerangka PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Sumber: RKP Tahun 2021

Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	PP 1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan				
	Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan				
	1.1 Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	35	50	70	100
	1.2 Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	16	30	40	100
	1.3 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	15	30	60	100
	1.4 Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun (%)	86,01	92,00	95,00	100
2	PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial				
	Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan				
	2.1 Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	83,47	82,00	85,00	98,00
	2.2 Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	14,85	15,50	14,70	11,00
	2.3 Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	11,12	11,60	11,00	<10,00
	2.4 Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	0,78	2,70	5,00	20,00

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
2.5	Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan				
	- Pekerja formal (%)	41,43	26,59	29,44	37,24
	- Pekerja informal (%)	3,57	3,53	4,44	7,35
3	PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan				
	Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan				
3.1	Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	24,0	20,6	19,5	16,0
3.2	Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	15,0	12,9	12,2	10,0
3.3	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%)	57,20	61,78	62,16	63,41
3.4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10,60	8,60	8,30	7,40
3.5	Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	36	25	24	18
3.6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,19	8,08	7,80	7,00
3.7	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24	0,21	0,21	0,18
3.8	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285	325	345	405
3.9	Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	177	110	280	420
3.10	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,90	64,00	78,00	90,00
3.11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	46	65	80	100
3.12	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	70	80	90	100
3.13	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23	35	59	83
3.14	Persentase obat memenuhi syarat (%)	78,60	80,80	83,60	92,30
3.15	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76	78	80	86
4	PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas				
	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas				
4.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (nilai)				
	- SMA/SMK/MA Sederajat	0,77	0,72	0,74	0,84
	- Pendidikan Tinggi	0,18	0,19	0,20	0,23
4.2	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%):				
	- Membaca	30,10	30,10	33,00	34,10
	- Matematika	28,10	28,10	30,00	30,90
	- Sains	40,00	40,00	42,60	44,00
4.3	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)				
	- Literasi	53,20	57,20	58,20	61,20
	- Numerasi	22,90	26,50	27,40	30,10
4.4	Tingkat penyelesaian pendidikan (%)				
	- SD/MI/ sederajat	93,03	92,77	93,25	94,78
	- SMP/MTs/ sederajat	83,12	85,00	86,53	89,49
	- SMA/SMK/MA/ sederajat	58,06	66,43	68,69	76,47
4.5	Persentase anak kelas I SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	63,30	66,49	68,06	72,77
4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,28	33,47	34,56	37,63
5	PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda				
	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha				
5.1	Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	11,21	10,19	9,80	8,74
5.2	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki 61,70 Perempuan 62,00	Menurun	Menurun	Menurun

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
	5.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	72,10	73,24	73,50	74,18
	5.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	51,89	52,51	53,13	55,00
	5.5 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	9,40	Menurun	Menurun	Menurun
	5.6 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	0,35	0,37	0,39	0,43
6	PP 6. Pengentasan Kemiskinan				
	Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan				
	6.1 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	23	35	38	50
	6.2 Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	668.040	1.518.551	1.718.556	2.174.935
7	PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing				
	Meningkatnya produktivitas dan daya saing				
	7.1 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	46,60	46,60	48,40	52,60
	7.2 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	64,34	64,70	65,28	66,70
	7.3 Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)	94	100	184	304
	7.4 Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)	143	26	150	700
	7.5 Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)	52	22	20	210
	7.6 Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	1.362	1.138	2.000	3.000
	7.7 Jumlah paten granted (domestik) (paten)	790	784	850	1.000
	7.8 Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%)	14,08	14,08	16,00	20,00
	7.9 Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI)	81	106	120	138
	7.10 Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif) (lembaga/unit kerja)	48	0	60	75
	7.11 Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur)	6	3	4	10
	7.12 Jumlah Science Techno Park yang ada yang dikembangkan (unit):				
	- Berbasis perguruan tinggi	17	0	5	5
	- Berbasis non perguruan tinggi	28	3	3	3
	7.13 Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)	0	0	0	40
	7.14 Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (teknologi):				
	- Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam	12	5	15	24
	- Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi Pasca bencana	35	35	35	35
	7.15 Proporsi anggaran litbang terhadap PDB (%)	0,25	0,27	0,30	0,42
	7.16 Budaya dan Prestasi Olahraga:				
	Jumlah Perolehan Medali Emas Olympic Games (medali)	1	-	2	3
	Jumlah Perolehan Medali Emas Paralympic Games (medali)	0	-	1	3

Sumber: RKP Tahun 2021

d) Prioritas Nasional 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat. Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Upaya untuk memperkuat karakter dan sikap mental dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental mencakup integritas, etos kerja, dan gotong royong. Internalisasi nilai-nilai tersebut dilakukan pada tataran individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, dan lembaga-lembaga negara. Selain itu, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan juga diarahkan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan melalui pemajuan kebudayaan.

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan pada upaya mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 melalui (1) memperkuat pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui bidang pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta sistem sosial pada keluarga dan masyarakat, serta pembinaan ideologi Pancasila; (2) membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, mengembangkan media baru berbasis IT sebagai wahana ekspresi budaya, dan mengembangkan dana perwalian kebudayaan; (3) meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; dan (4) mengembangkan layanan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya				
	1.1 Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	68,30	69,57	70,78	74,29
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan				
	2.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	55,23	56,72	58,21	62,70
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial				
	3.1 Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	0,61	0,62	0,63	0,65
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat				
	4.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	73,83	74,20	74,60	75,80
5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa				
	5.1 Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	53,60	53,60	55,00	61,00
	5.2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	21,80	21,90	22,00	22,10
6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif				
	6.1 Nilai Budaya Literasi (nilai)	57,70	60,37	63,03	71,04

Sumber: RKP Tahun 2021

Pencapaian sasaran PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat PP, yaitu (1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial; dan (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

Gambar 5. Kerangka PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Adapun sasaran, indikator, dan target PP pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter				
	Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu				
	1.1 Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	78,98	79,06	79,14	79,38
	1.2 Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	68,98	69,97	70,96	73,95
	1.3 Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	76,42	76,96	77,34	78,08
	1.4 Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	50,08	53,46	56,70	66,39
	1.5 Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai)	67,03	68,40	69,74	73,65
	Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter				
	1.6 Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)	12,29	12,00	11,50	10,00
	1.7 Indeks Karakter Remaja (nilai)	67,92	67,92	68,42	69,92
2	PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia				
	Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan				
	2.1 Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	43,86	46,61	49,36	57,60
	2.2 Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	36,97	37,38	37,79	39,01
	2.3 Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	33,79	37,03	40,28	50,00
3	PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial				
	Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama				
	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai)	85,91	85,95	85,96	86,00
	3.2 Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai)	77,28	80,00	81,00	84,00
	3.3 Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal (nilai)	60,00	60,00	65,00	80,00
	3.4 Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (nilai)	60,00	60,00	70,00	90,00
4	PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter				
	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif				
	4.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	10,12	11,00	12,00	15,00

Sumber: RKP Tahun 2021

e) Prioritas Nasional 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2021 akan mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2021 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 pada sektor riil (industri, pariwisata, dan investasi) serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat. Fokus utamanya antara lain (1) infrastruktur pelayanan dasar, (2) infrastruktur konektivitas, (3) infrastruktur perkotaan, (4) energi dan ketenagalistrikan, (5) transformasi digital, serta (6) mengedepankan ketangguhan infrastruktur menghadapi bencana. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya, antara lain pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan irigasi; pemeliharaan jalan; penyediaan air minum dan sanitasi; serta peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat.

Sasaran dan indikator utama PN Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 15. Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 5 :
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar				
	1.1 Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	56,75	59,50	62,32	70,67
	1.2 Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	59	60	65
	1.3 Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, %)	0	0	6,5	19,6
	1.4 Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (Kumulatif, %)	30,0	31,7	33,7	38,9
2	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar				
	2.1 Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,30	2,30	2,20	1,90
	2.2 Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	23	24	25	27
3	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan				
	3.1 Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6
4	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan				
	4.1 Rasio Elektrifikasi (%)	98,89	100	100	100
	4.2 Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh/Kapita)	1.084	1.142	1.203	1.400
5	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK				
	5.1 Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalabar (4G) (%)	97,25	97,5	98	100

Sumber: RKP Tahun 2021

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar akan dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar; (2) Infrastruktur Ekonomi; (3) Infrastruktur Perkotaan; (4) Energi dan Ketenagalistrikan; dan (5) Transformasi Digital, sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 6. Kerangka PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Sumber: RKP Tahun 2021

Untuk sasaran, indikator, dan target Program Prioritas dari Prioritas Nasional ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
I	PP I. Infrastruktur Pelayanan Dasar				
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau				
I.1	Rasio KPR terhadap PDB (%)	2,90	3,05	3,10	4,00

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
	1.2 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,25	92,46	92,67	93,31
	1.3 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	81,11	81,55	81,99	83,33
	1.4 Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	46,42	47,02	47,62	49,42
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman				
	1.5 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	89,27	90,41	92,81	100
	1.6 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	6,70	7,30	8,40	15
	1.7 Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20,18	21,23	23,54	30,45
	1.8 Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	69,08	69,18	69,27	69,55
	1.9 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	77,44 layak	78,10 layak	79,43	90
	1.10 Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	7,61	5,95	4,46	0
	1.11 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	59,08	72,92	73,70	80
	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan				
	1.12 Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kabupaten/kota)	154	163	173	200
	Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi				
	1.13 Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	28	27	27	25
	Meningkatnya Optimalisasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi				
	1.14 Volume tampungan air per kapita (Kumulatif, m ³ /kapita)	51,30	52,57	53,53	56,98
	1.15 Persentase luas sawah beririgasi (%)	52,6	63,8	54,0	59,3
	1.16 Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (hektare)	0	0	398.123	597.226
2	PP 2. Infrastruktur Ekonomi				
	Meningkatnya konektivitas wilayah				
	2.1 Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	92/68/57	92/68/57	93/69,5/58,5	97,75/65
	2.2 Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (Km)	1.461	481	242	2.500
	2.3 Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,50	81,50	83	94
	2.4 Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387	500	679	3.000
	2.5 Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km'sp)	6.164	6.188	6.293	7.451
	2.6 Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	1	2	7
	2.7 Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	21	26	25
	2.8 Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24	6	6	36
	2.9 Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	15	7	12	21
	2.10 Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	28	31	43
3	PP 3. Infrastruktur Perkotaan				
	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan				
	3.1 Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/flyover/underpass (kota)	3	0	3	6
4	PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan				
	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien				
	4.1 Jumlah Produksi Tenaga Listrik (GWh)	275.900	339.082	359.946	431.281
	4.2 Nilai Penurunan Emisi CO ₂ Pembangkit (juta ton)	3,88	4,71	4,92	6,07
	4.3 Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (kumulatif, Sambungan Rumah)	537.936	715.800	1.470.506	4.027.491
	4.4 Jumlah Kapasitas Kilang Minyak-kumulatif (Barrel per Calendar Day/BPCD)	1.151.000	1.151.000	1.150.000	1.276.000

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
5	PP 5. Transformasi Digital				
	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi				
	5.1 Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	8,80	8,80	8,80	8,80
	5.2 Persentase pengguna internet (%)	64,80	72,60	74,20	82,30
	5.3 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	67	70	72	75,70

Sumber: RKP Tahun 2021

f) Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Kebijakan utama pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2021 diprioritaskan kepada (a) penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara terintegrasi yang disertai dengan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk penanganan limbah medis pascapandemi COVID-19; (b) penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi, tektonik, vulkanik, hidrometeorologi, dan lingkungan) serta bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan meluasnya penyebaran penyakit menular/pandemi) yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam rangka reformasi (penguatan) sistem ketahanan bencana; serta (c) peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi Indonesia, dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdapat pada tabel berikut.

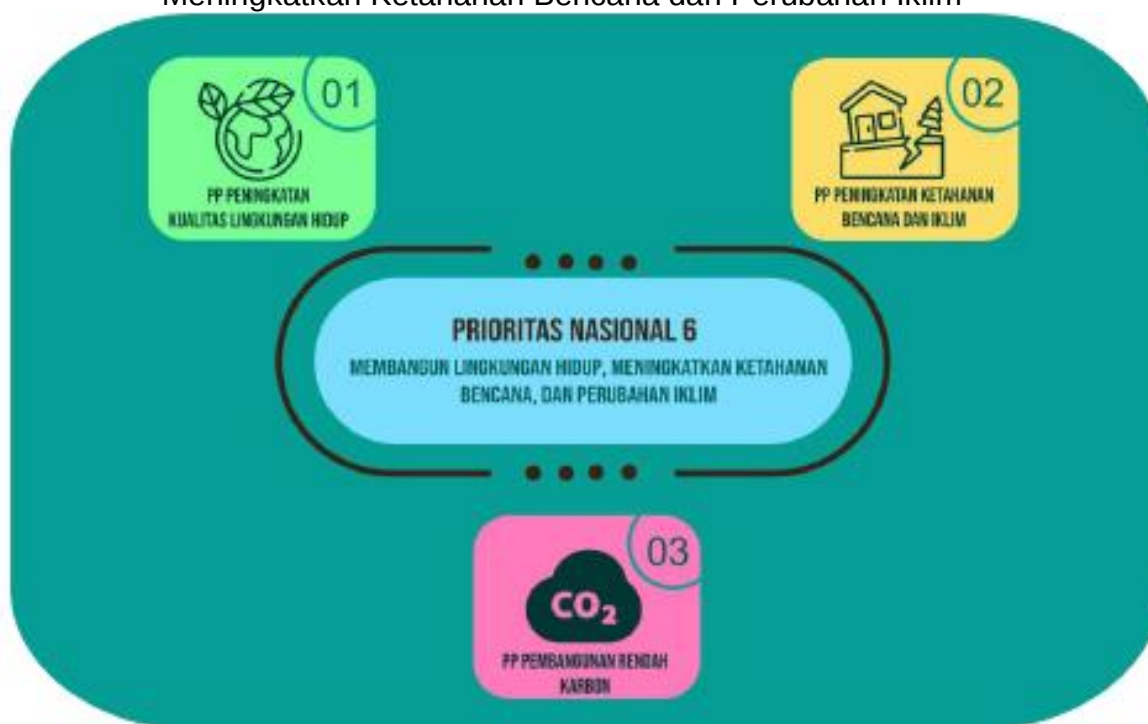
Tabel 17. Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 6 :
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
	1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	66,56	68,71	68,96	69,74
2	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim				
	2.1 Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	N/A	0,44	0,69	1,25
3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline				
	3.1 Persentase penurunan emisi GRK (%)	22,60	25,36	23,55	26,35
	3.2 Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	22,80	24,57	23,40	29,91

Sumber: RKP Tahun 2021

Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terdiri dari tiga PP, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta (3) Pembangunan Rendah Karbon, sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 7. Kerangka PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim



Sumber: RKP Tahun 2021

Sementara sasaran, indikator, dan target PP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				
	Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut				
	1.1 Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	52,65	55,10	55,20	55,50
	1.2 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	N/A	58,50	59,00	60,50
	1.3 Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	86,57	84,10	84,20	84,50
	1.4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)	62,00	61,60	62,50	65,50
2	PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim				
	Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat				
	2.1 Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	N/A	0,08	0,10	0,10
	2.2 Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	N/A	0,34	0,59	1,15
	2.3 Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	>5,00	5,00	4,50	3,00
3	PP 3. Pembangunan Rendah Karbon				
	Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (%)				
	3.1 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	10,30	14,45	14,06	16,87
	3.2 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	36,40	38,02	35,11	38,86
	3.3 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	8,00	7,70	6,89	9,73
	3.4 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	0,60	1,95	4,18	4,55
	3.5 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	6,30	6,50	5,60	7,00

Sumber: RKP Tahun 2021

g) Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga. Sebagai implikasi dari pandemi COVID-19, arah kebijakan pembangunan Polhukhankam pada tahun 2021 akan difokuskan untuk mendukung tema RKP 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Dalam konteks tersebut, untuk meningkatkan efektivitas dalam merespon dampak pandemi COVID-19, diperlukan situasi yang kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*).

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal				
	1.1 Indeks Demokrasi Indonesia(1) (nilai)	74,92	77,36	77,72	78,37
	1.2 Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah(2) (%)	69,43	70	65	70
2	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri				
	2.1 Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional (3) (nilai)	95,20	95,07	95,27	95,67
3	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap				
	3.1 Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	0,62	0,65	0,67	0,73
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola				
	4.1 Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas (4) (%)				
	K/L	95,29	70,00	75,00	85,00
	Provinsi	73,53	50,00	60,00	85,00
	Kabupaten/Kota	25,20	30,00	35,00	70,00
5	Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional				
	5.1 Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang dapat diatasi (%)	100	100	100	100

Sumber: RKP Tahun 2021

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik akan dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Konsolidasi Demokrasi, (2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, (3) Penegakan Hukum Nasional, (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan (5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 8. Kerangka PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Sumber: RKP Tahun 2021

Sementara sasaran, indikator, dan target PP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
1	PP 1. Konsolidasi Demokrasi				
	Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif				
	1.1 Jumlah regulasi/ kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	3	6	3	2
2	PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri				
	Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional				
	2.1 Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	8	8	10	16
	2.2 Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	3,78	3,80	3,85	4,00
	2.3 Indeks Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI (nilai)	89,91	86,00	87,00	90,00
3	PP 3. Penegakan Hukum Nasional				
	Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan				
	3.1 Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	3,70	4,00	4,03	4,14
4	PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola				
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah				
	4.1 Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (%)				
	Kementerian	29,00	90,00	100,00	100,00
	LPNK	21,00	65,00	80,00	100,00
	Provinsi	15,00	37,00	49,00	85,00
	Kabupaten/Kota	0,39	10,00	15,00	30,00

NO	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
4.2	Instansi Pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (instansi pemerintah)	99 per 277	135 per 587	142 per 587	164 per 587
4.3	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik ke Atas (%)				
	Kementerian	61,30	70,00	**	100,00
	Provinsi	50,00	50,00	**	80,00
	Kabupaten/Kota	23,70	20,00	**	50,00
4.4	Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (%)				
	Kementerian	94,00	91,00	92,00	95,00
	Provinsi	94,00	91,00	92,00	95,00
	Kabupaten	79,00	77,00	80,00	85,00
	Kota	90,00	91,00	92,00	95,00
4.5	Persentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (%)				
	Kementerian	94,12	94,00	96,00	100,00
	Provinsi	97,06	85,00	87,00	100,00
	Kabupaten/Kota	57,28	50,00	55,00	80,00
5	PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional				
	Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan				
5.1	Indeks Kekuatan Militer (nilai)	0,28	0,26	0,25	0,20
5.2	Indeks Terorisme Global (nilai)	5,07	4,44	4,39	4,24
5.3	Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	53,32	>55	>55	>60
5.4	Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional (nilai)	N/A	3,10	3,20	3,40

Sumber: RKP Tahun 2021

BAB II

PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH PROVINSI NTB DAN KABUPATEN/KOTA SE-NTB TAHUN 2021

Pada tahun 2021 jumlah total dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota baik dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan untuk triwulan I sebesar Rp.363.325.711.000 dan telah terealisasi hingga per 31 Maret Rp.18.808.515.842 atau 5,18%. Untuk Pemerintah Provinsi dana APBN yang dikelola sebesar Rp.345.404.465.000 yang terdiri dari Dekonsentrasi sebesar Rp.102.008.026.000 dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.243.396.439.000 dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.4.107.586.690 atau 4,03% dan Rp.14.550.557.652 atau 5,98%. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota hanya melaksanakan Tugas Pembantuan dengan pagu total sebesar Rp.17.921.246.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.150.371.500 atau 0,84%.

Rendahnya pencapaian baik kinerja dan keuangan disebabkan karena terdapat beberapa program dan kegiatan yang masih dalam proses perencanaan; penunjukan pengelola administrasi keuangan pada satker; belum terbitnya petunjuk pelaksanaan pada beberapa satker; dan adanya program dan kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan oleh satker. Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan capaian realisasi dana APBN Tahun 2021 untuk Triwulan I dalam tabel berikut ini.

Tabel 21. Capaian Realisasi APBN Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
A	Provinsi	345,404,465,000	18,658,144,342	5.40
	Dekonsentrasi	102,008,026,000	4,107,586,690	4.03
	Tugas Pembantuan	243,396,439,000	14,550,557,652	5.98

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
B	Kabupaten/Kota	17,921,246,000	150,371,500	0.84
	Tugas Pembantuan	17,921,246,000	150,371,500	0.84
	Total	363,325,711,000	18,808,515,842	5.18

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2021 (data diolah)

A. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH PROVINSI NTB

Pelaksanaan APBN pada Pemerintah Provinsi NTB diselenggarakan melalui 2 kewenangan yaitu Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh 45 Satuan Kerja pada Triwulan I ini. Sebanyak 37 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan 8 Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota hanya melaksanakan Tugas Pembantuan yang diselenggarakan oleh 5 Satuan Kerja.

Besaran pagu dan realisasi capaian penyelenggaraan dana APBN pada Pemerintah Provinsi Triwulan I Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Capaian Realisasi APBN Tahun 2021 Triwulan I pada Pemerintah Provinsi NTB

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	FISIK (%)
				DJPb	DJPb		
A	DINAS KESEHATAN			29,190,519,000	-	-	-
1	DK	230003	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	359,786,000	-	-	-
2	DK	239000	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	10,032,567,000	-	-	-
3	DK	239005	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2,801,407,000	-	-	-
4	DK	239006	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	12,127,975,000	-	-	-
5	DK	239007	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	417,301,000	-	-	-
6	DK	239008	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3,451,483,000	-	-	-
B	BAPPEDA			1,325,108,000	-	-	-
7	DK	230020	BAPPEDA PROV. NUSA TENGGARA BARAT	974,491,000	-	-	-
8	DK	484160	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	350,617,000	-	-	-

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	FISIK (%)
				DJPb	DJPb		
C	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			4,665,069,000	125,900,490	2.70	4.32
9	DK	235221	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	527,147,000	20,399,250	3.87	3.87
10	DK	239065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	462,869,000	-	-	-
11	DK	239066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	2,647,265,000	48,900,800	1.85	1.85
12	DK	239067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	151,802,000	9,830,000	6.48	6.48
13	DK	239068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	477,486,000	22,460,440	4.70	7.65
14	DK	239069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	398,500,000	24,310,000	6.10	6.10
D	DINAS KETAHANAN PANGAN			11,615,080,000	1,390,690,000	11.97	11.97
15	DK	239220	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	11,615,080,000	1,390,690,000	11.97	11.97
E	DINAS KOPERASI UKM			2,239,172,000	304,750,000	13.61	13.61
16	DK	230046	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2,239,172,000	304,750,000	13.61	13.61
F	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1,883,194,000	-	-	-
17	DK	350333	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTB	1,883,194,000	-	-	-
G	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			3,795,310,000	-	-	-
18	DK	230071	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3,795,310,000	-	-	-
H	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP			726,716,000	-	-	-
19	DK	230024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB	386,716,000	-	-	-
20	DK	433352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB	340,000,000	-	-	-

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	FISIK (%)
				DJPb	DJPb		
I	DINAS PERDAGANGAN			1,969,560,000	15,620,000	0.79	1.02
21	DK	239029	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	768,493,000	15,620,000	2.03	2.03
22	DK	239077	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,201,067,000	-	-	-
J	DINAS PERINDUSTRIAN			1,654,646,000	-	-	-
23	DK	239033	DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,654,646,000	-	-	-
K	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			479,526,000	-	-	-
24	DK	230038	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	479,526,000	-	-	-
L	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN			220,424,674,000	12,357,791,302	5.61	9.48
25	DK	239009	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	6,547,387,000	93,950,000	1.43	1.43
26	DK	239011	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,726,125,000	148,155,100	8.58	8.58
26	DK	239071	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	7,108,120,000	757,936,100	10.66	10.66
27	DK	239072	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	706,758,000	74,575,000	10.55	10.55
28	DK	239224	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	13,573,894,000	771,200,000	5.68	7.89
29	TP	239126	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	138,713,998,000	580,383,000	0.42	2.50
30	TP	239127	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,572,750,000	19,620,000	1.25	3.40
31	TP	239128	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	5,258,737,000	1,092,320,302	20.77	20.77

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	FISIK (%)
				DJPb	DJPb		
32	TP	239133	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	45,216,905,000	8,819,651,800	19.51	19.51
M	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN			22,216,796,000	670,956,200	3.02	7.42
33	TP	239129	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	22,216,796,000	670,956,200	3.02	7.42
O	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PR			29,628,703,000	3,367,626,350	11.37	18.25
34	TP	239234	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	23,469,675,000	1,654,553,400	7.05	7.05
35	TP	239237	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB	6,159,028,000	1,713,072,950	27.81	29.45
P	DINAS SOSIAL			6,589,201,000	18,200,000	0.28	0.42
36	DK	230017	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	205,055,000	-	-	-
37	DK	239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	891,974,000	-	-	-
38	DK	239023	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3,445,352,000	-	-	-
39	DK	418854	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	183,740,000	-	-	-
40	DK	418974	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,863,080,000	18,200,000	0.98	2.10
Q	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			5,237,971,000	406,610,000	7.76	5.53
41	DK	239028	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NUSA TENGGARA BARAT	536,764,000	38,610,000	7.19	7.19
42	DK	239225	DINAS TENAGA KERJA PROV. NUSA TENGGARA BARAT (I3)	3,912,657,000	368,000,000	9.41	9.41
43	TP	350327	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NUSA TENGGARA BARAT	788,550,000	-	-	-
R	INSPEKTORAT			330,070,000	-	-	-
44	DK	484161	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	330,070,000	-	-	-
S	SEKRETARIAT DAERAH			1,433,150,000	-	-	-

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	FISIK (%)
				DJPb	DJPb		
45	DK	239236	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,433,150,000	-	-	-
PEMERINTAH PROVINSI				345,404,465,000	18,658,144,342	5.40	5.60

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2021 (data diolah)

B. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB pada Triwulan I sebesar Rp.17.921.246.000 dengan realisasi sebesar Rp.150.371.500 atau 0,84% yang dilaksanakan oleh 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat sebanyak 1 Satuan Kerja, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 Satuan Kerja, Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 Satuan Kerja, dan Kabupaten Bima sebanyak 2 Satuan Kerja.

Adapun capaian realisasi dari pelaksanaan APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Capaian Realisasi APBN Tahun 2021 Triwulan I pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB

NO	KEW	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	FISIK (%)
				DJPb	DJPb		
KABUPATEN LOMBOK BARAT				1,745,313,000	17,940,000	1.03	1.03
46	TP	239242	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK BARAT	1,745,313,000	17,940,000	1.03	1.03
KABUPATEN LOMBOK TIMUR				1,745,313,000	-	-	-
47	TP	230340	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. LOMBOK TIMUR	1,745,313,000	-	-	-
KABUPATEN SUMBAWA				1,607,750,000	21,351,500	1.33	1.33
48	TP	230576	DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA	1,607,750,000	21,351,500	1.33	1.33
KABUPATEN BIMA				12,822,870,000	111,080,000	0.87	1.94
49	TP	239050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BIMA	5,058,994,000	111,080,000	2.20	3.87
50	TP	350330	DINAS NAKERTRANS KAB. BIMA	7,763,876,000	-	-	-
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				17,921,246,000	150,371,500	0.84	1.56

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2021 (data diolah)

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan APBN pada Triwulan I Tahun 2021 baik dilaksanakan oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan maupun Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota masih rendah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN di wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan oleh 50 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 45 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (8 Satker Tugas Pembantuan dan 37 Satker Dekonsentrasi) dan 5 Satker dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB. Total alokasi anggaran sebesar Rp.363.325.711.000 yang terdiri atas alokasi anggaran pada Satker Provinsi sebesar Rp.345.404.465.000 (Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.102.008.026.000 dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.243.396.439.000) dan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) sebesar 17.921.246.000. Adapun realisasinya pada triwulan 1 tahun 2021, telah terealisasi sebesar Rp.18.808.515.842 atau hanya 5,18% dengan realisasi fisik mencapai 7,15%, dengan rincian realisasi yang diselenggarakan oleh 45 Satker Provinsi sebesar Rp.18.658.144.342 atau 5,40% dengan realisasi fisik sebesar 5,60% (Dana Dekonsentrasi terealisasi sebesar Rp.4.107.586.690 atau 4,03% dan Dana Tugas Pembantuan terealisasi sebesar Rp.14.550.557.652 atau 5,98%). Pada Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB terealisasi sebesar Rp.150.371.500 atau 0,84% dengan realisasi fisik 1,56%.

Masih rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) pada Triwulan I Tahun 2021 secara umum disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya;
2. Masih ada dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dalam kategori Blokir;
3. Belum adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana APBN;
4. Terjadinya pergantian pengelola administrasi keuangan sehingga diperlukan waktu untuk penunjukan kembali.

B. SARAN

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana APBN baik pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, maka disarankan

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan APBN baik dalam penataan administrasi dan petunjuk teknis yang diperlukan secara terjadwal dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DJPB Kementerian Keuangan Provinsi NTB terkait dengan administrasi keuangan;
3. BAPPEDA Provinsi NTB dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;
4. Satuan Kerja dihimbau untuk terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA melalui aplikasi yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan.